

BAB III

PENCALONAN INDONESIA MENJADI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB PERIODE 2019-2020

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, yang mana penulis akan membagi bab ini ke dalam tiga sub bab. Pada sub bab pertama akan diuraikan tentang keinginan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020, yang dimulai dari pernyataan resmi Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-71 bahwa Indonesia akan mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Pada sub bab kedua akan diuraikan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia untuk dapat terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Pada sub bab ketiga, akan diuraikan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk dapat terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

A. Keinginan Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Keinginan Indonesia untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020 membutuhkan usaha yang besar dari pemerintah Indonesia sendiri agar keinginan tersebut dapat terwujud. Dewan Keamanan PBB memiliki dua macam keanggotaan, yaitu tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri atas lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia, dan Prancis. Anggota tidak tetap DK PBB yang memiliki masa jabatan dua tahun terdiri atas 10 negara perwakilan dari lima kawasan, kawasan Afrika, kawasan Asia pasifi, kawasan

Eropa Timur, kawasan Amerika Latin dan Karibia, dan Kawasan Eropa Barat dan lainnya.

Salah satu alasan Indonesia ingin menjadi anggota tidak tetap DK keamanan adalah karena DK PBB memiliki kewenangan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kewenangan DK PBB tersebut sejalan dengan amanah pembukaan UUD 1945 untuk melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 23 September 2017 di Markas PBB "Itu perintah UUD, itu yang mengatakan Indonesia harus bekerja dengan keras untuk menjamin perdamaian dunia dan apabila itu kita harus aktif antara lain di Dewan Keamanan" (Nugroho, 2016).

Dengan kewenangan DK PBB yang besar, membuat negara-negara termasuk Indonesia ingin untuk ikut menjadi bagian dari DK PBB tersebut. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB maka peran Indonesia dapat lebih diakui oleh negara-negara di dunia. Indonesia dapat lebih banyak mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya serta menunjukkan sikapnya dalam menangani berbagai isu-isu internasional. Dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, suara Indonesia dapat didengar dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan PBB. Oleh karena itu, negara-negara anggota PBB ingin menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Pada Sidang Umum PBB ke-71 yang dilaksanakan September 2016, Indonesia yang kala itu diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan bahwa Indonesia mengajukan diri untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020 perwakilan kawasan Asia Pasifik. Satu hari sebelum menyatakan pencalonannya dalam Sidang Umum

PBB, Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020 pada resepsi diplomat di New York (Maulana, 2016). Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 akan berlangsung pada Juni 2018 (Viva, 2016).

Indonesia sangat optimis dengan pencalonannya untuk menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB kali ini. Indonesia yakin akan memenangkan DK PBB periode 2019-2020. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan beberapa wakil-wakil negara yang meyakini bahwa Indonesia akan terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Beberapa diantaranya adalah :

1. Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat optimis bahwa Indonesia akan menang dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 mewakili kawasan Asia Pasifik. Wakil Presiden menyatakan "Sudah optimistis bahwa Indonesia akan terpilih untuk tahun depannya (2019, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB" (Kuwado, 2016). Keyakinan Wakil Presiden tersebut dikarenakan banyaknya dukungan yang diberikan oleh negara-negara kepada Indonesia.

2. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Sama halnya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga sangat optimis bahwa Indonesia akan menang dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 mewakili kawasan Asia Pasifik. Menteri Luar Negeri yang ditemui sela-sela kegiatannya dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, menyatakan "Kita sangat optimis bisa terpilih.

Dukungan dari hari ke hari semakin bertambah,” (Musyaffa, 2017).

3. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir

Arrmanatha Nasir optimistis Indonesia bisa terpilih. Indonesia memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Arrmanatha Nasir menyatakan "Bahkan, kita masuk 10 besar negara yang paling berkontribusi dalam mengirimkan kontingen perdamaian kita ke daerah konflik di bawah bendera PBB" (Dharma, 2016).

4. Wakil Tetap RI Untuk PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani

Duta Besar Dian Triansyah Djani menyatakan bahwa Indonesia sangat berpeluang menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Dian Triansyah Djani menyatakan keyakinannya terhadap keberhasilan Indonesia (Maharani, 2016)

“Tentunya kita optimistis. Kita mempunyai berbagai kelebihan. Indonesia adalah negara yang toleran dan memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kita juga memiliki banyak pengalaman dalam berbagai misi PBB, seperti misi perdamaian sejak 1950-an"

B. Kekuatan Indonesia dalam Pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB

Indonesia memiliki keuntungan yang sangat banyak untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Pada sub bab sebelumnya, beberapa pejabat negara bahkan menyatakan keyakinan mereka akan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, yang mana keyakinan tersebut didasarkan pada kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Diantaranya adalah Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar dunia. Indonesia merupakan bukti bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang bagi terciptanya suatu perdamaian. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB terbanyak (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016). Indonesia berperan aktif dalam penyelesaian isu-isu internasional, khususnya dalam hal pemeliharaan perdamaian. Indonesia memiliki pengalaman telah tiga kali menjabat posisi anggota tidak tetap DK PBB.

1. Bukti Negara Damai di Tengah Keberagaman Masyarakatnya

Dalam menggalang dukungan kepada Negara lain, Indonesia melalui perwakilannya selalu menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang damai walaupun Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Hal ini juga disampaikan oleh Duta besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman, Fauzi Bowo. Ia menyampaikan Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi

terbesar ketiga dunia, dan berpenduduk Muslim terbesar dunia, serta keserasian Islam dengan demokrasi, menjadikan Indonesia layak menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB (Berita Satu, 2016).

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Indonesia merupakan bukti bahwa Islam, demokrasi, modernitas dan penguatan perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni. Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang didiami oleh lebih dari 1300 kelompok etnis. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan model sejati bagi toleransi dan pluralisme, nilai yang selalu diterapkan oleh Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain (Erdianto, 2016).

Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya beragam. Hal ini tercermin dalam semboyan “Bhinneka tunggal ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh masing-masing masyarakatnya. Akan tetapi walaupun berbeda-beda, namun mereka hidup rukun dan damai di Indonesia. Walaupun belakangan ini, sering terjadi pergolakkan dalam negeri akan tetapi hingga saat ini masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan, aman, dan damai.

2. Peran Aktif Indonesia dalam Penyelesaian Permasalahan Internasional

Indonesia memiliki tugas untuk memelihara perdamaian dunia, sebagai mana tercantum dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tidak hanya perdamaian dalam negerinya saja, akan tetapi perdamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia selalu berperan aktif dan berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia memainkan peran penting untuk membantu negara-negara yang sedang berkonflik atau terlibat konflik. Indonesia juga merupakan salah satu negara pengirim pasukan pemeliharaan PBB terbanyak.

a. Mendorong Kemerdekaan Palestina

Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar menyuarakan dukungannya bagi kemerdekaan Palestina. Indonesia bahkan menjadikan isu Palestina ini sebagai isu khusus yang harus ditangani (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016). Indonesia juga sering menyerukan permasalahan Palestina ini ke beberapa organisasi internasional, diantaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam, dengan harapan agar organisasi internasional tersebut dapat memberikan bantuan dan mencari solusi yang terbaik bagi Palestina (Kuwado, 2017).

b. Membantu Permasalahan etnis Rohingnya di Rakhine, Myanmar

Indonesia juga memiliki peran dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri menemui Pemimpin Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Hasil dari pertemuan tersebut adalah terbukanya akses untuk memberikan bantuan bagi warga Rohingnya. Indonesia merupakan negara pertama yang merespon permasalahan yang terjadi di negara bagian tersebut dengan mengutus langsung

perwakilannya ke Myanmar (Deutsche Welle, 2017). Tidak hanya bertemu dengan pemimpin Myanmar secara langsung, tetapi Indonesia juga meresmikan aliansi lembaga swadaya masyarakat, aliansi lembaga swadaya masyarakat tersebut bahkan telah membuat program yang dinamakan *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) untuk Myanmar. Dalam program tersebut merupakan program pemberian bantuan pengembangan kapasitas untuk area dan masyarakat yang terdampak konflik di Rakhine, yang akan dilaksanakan selama 2 tahun, dimulai sejak 2017 ini, dan berfokus pada empat bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan humanitarian relief. Bantuan lain yang diberikan Indonesia adalah pendirian rumah sakit Indonesia di Negara bagian Rakhine (Hasan, 2017).

c. Mengirim pasukan perdamaian pada misi PBB

Dalam menjaga perdamaian dunia, Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan pasukan perdamaian terbanyak di dunia. Indonesia menargetkan akan mengirimkan sebanyak 4.000 pasukan perdamaian hingga tahun 2019 untuk mendukung posisi Indonesia sebagai calon anggota tidak tetap DK PBB 2019 (Paskalis, 2016). Pada Juli 2017 pemerintah Indonesia mengadakan rapat di Kantor Wakil Presiden, dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan mengirimkan 1.040 pasukan lagi untuk misi perdamaian PBB (Ihsanuddin, 2017). Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB pada tahun 1957, dengan daerah tujuan yaitu Mesir. Hingga saat ini, tercatat Indonesia sudah mengirimkan 35.000 pasukan perdamaian

Indonesia pada misi-misi perdamaian PBB (Paskalis, 2016).

Berdasarkan data *United Nations Peacekeeping* pada bulan oktober 2017, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB adalah sejumlah 2.692 personel. Dengan jumlah personel tersebut, Indonesia berada di urutan ke-10 dari 125 negara yang memberikan kontribusi berupa pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB (*United Nations Peacekeeping*, 2017). Pasukan perdamaian yang dikirimkan Indonesia bertugas dalam sembilan misi dari lima belas misi pemeliharaan perdamaian PBB, yaitu (*United Nations Peacekeeping*, 2017):

1) MINUJUSTH (*United Nations Mission for Justice Support in Haiti*)

MINUJUSTH dibuat pada oktober 2017 dengan mandat untuk membantu pemerintah Haiti untuk lebih mengembangkan kepolisian nasionalnya, memperkuat aturan lembaga hukumnya, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dengan maksud untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Haiti. MINUJUSTH merupakan misi pemeliharaan perdamaian PBB yang baru saja dibentuk, untuk periode awal selama enam bulan yang dimulai 16 Oktober 2017 sampai 15 April 2018. (*United Nations Mission for Justice Support in Haiti*, 2017). Hingga oktober 2017, terdapat lima (5) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk MINUJUSTH (*United Nations Peacekeeping*, 2017).

2) MINURSO (*United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara*)

MINURSO dibuat pada April 1991, MINURSO dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan memastikan sebuah referendum yang bebas dan adil. Rencana penyelesaian yang telah disepakati DK PBB, memberikan waktu transisi untuk persiapan referendum, yang mana rakyat Sahara Barat akan memilih untuk merdeka atau bersatu dengan Maroko (United Nations Peacekeeping, 2016). Hingga oktober 2017, terdapat lima (5) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk MINURSO (United Nations Peacekeeping, 2017).

3) MINUSCA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*)

MINUSCA dibuat pada April 2014 dengan tujuan melindungi warga sipil, mendukung proses transisi di Republik Afrika Tengah, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, mempromosikan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia, mendukung keadilan dan aturan hukum, serta proses pelucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi dan repatriasi di Afrika Tengah (United Nations Peacekeeping, 2017). Hingga oktober 2017, terdapat dua ratus tiga belas (213) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk MINUSCA (United Nations Peacekeeping, 2017).

4) MINUSMA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*)

MINUSMA dibuat pada April 2013 dengan tujuan untuk mendukung proses politik di Mali dan melaksanakan sejumlah tugas terkait keamanan. Misi ini diminta untuk mendukung pemerintah transisi Mali dalam rangka stabilisasi negara dan implementasi peta jalan atau rencana transisi (United Nations Peacekeeping, 2013). Hingga oktober 2017, terdapat delapan (8) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk MINUSMA (United Nations Peacekeeping, 2017).

5) MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic of the Congo*)

MONUSCO yang dibuat pada Juli 2010, memiliki mandate untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil, personil kemanusiaan, dan pembela hak asasi manusia yang berada dalam ancaman kekerasan fisik, dan untuk mendukung Pemerintah Republik Demokratik Kongo dalam upaya stabilisasi dan konsolidasi perdamaian (United Nations Peacekeeping, 2010). Hingga oktober 2017, terdapat seratus tujuh puluh delapan (178) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk MONUSCO (United Nations Peacekeeping, 2017).

6) UNAMID (United Nations Hybrid Operation in Darfur)

UNAMID yang dibuat pada Juli 2007 memiliki tugas utama untuk membeikan perlindungan terhadap warga sipil, namun

UNAMID juga ditugaskan untuk memberikan kontribusi keamanan untuk bantuan kemanusiaan, pemantauan dan verifikasi pelaksanaan kesepakatan, membantu proses politik, mempromosikan hak asasi manusia dan peraturan hukum, dan memantau serta melaporkan situasi di sepanjang perbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah (United Nations Peacekeeping, 2017). Hingga oktober 2017, terdapat sembilan ratus tujuh puluh lima (975) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk UNAMID (United Nations Peacekeeping, 2017).

7) UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon)

UNIFIL yang dibuat pada Maret 1978, pada awalnya memiliki tugas untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional dan membantu Pemerintah Lebanon dalam memulihkan otoritasnya di wilayah tersebut. Akan tetapi, berdasarkan kebutuhan dan perkembangan zaman, tugas UNIFIL kemudian bertambah, yaitu memantau penghentian permusuhan, menemani dan mendukung angkatan bersenjata Lebanon saat mereka menyebar di seluruh selatan Lebanon, serta memperluas bantuannya untuk memastikan akses kemanusiaan bagi warga sipil dan pemulangan orang-orang terlantar (United Nations Peacekeeping, 2006). Hingga oktober 2017, terdapat seribu dua ratus delapan puluh delapan (1.288) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk UNIFIL. Dengan jumlah perwakilan sebanyak itu, Indonesia menempati peringkat pertama dalam pengiriman pasukan perdamaian

pada misi PPB UNIFIL (United Nations Peacekeeping, 2017).

8) UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei)

UNISFA yang dibuat pada Juni 2011 ditugaskan untuk memantau wilayah Abyei yang merupakan wilayah yang rentan karena merupakan wilayah perbatasan antara Sudan bagian utara dan selatan, memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, dan memiliki wewenang untuk menggunakan kekerasan dalam melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan di Abyei (United Nations Peacekeeping, 2011). Hingga oktober 2017, terdapat tiga (3) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk UNISFA (United Nations Peacekeeping, 2017).

9) UNMISS (*United Nations Mission in the Republic of South Sudan*).

UNMISS yang dibuat pada Juli 2011 memiliki mandat untuk melindungi warga sipil, melakukan pemantauan terhadap hak asasi manusia, mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pelaksanaan perjanjian penghentian permusuhan (United Nations Peacekeeping, 2017). Hingga oktober 2017, terdapat tujuh belas (17) perwakilan Indonesia yang sedang bertugas untuk UNMISS (United Nations Peacekeeping, 2017).

3. Pengalaman Indonesia dalam menjadi anggota tidak tetap DK PBB

Indonesia telah tiga kali menjabat sebagai anggota DK PBB. Indonesia pernah tiga kali terpilih untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008 (United Nations Security Council, 2014). Indonesia pertama kali dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1973-1974 pada Sidang Umum PBB ke-27 dengan perolehan 115 suara (United Nations, 1972). Indonesia dipilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 1995-1996 dalam Sidang Umum PBB ke-49 dengan perolehan 164 suara (United Nations, 1994). Indonesia kembali dipilih untuk ketiga kalinya pada periode 2007-2008 dalam Sidang Umum PBB ke-61 dengan perolehan 158 suara (United Nations, 2006).

Pengalaman yang dimiliki Indonesia menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk pencalonan selanjutnya. Kinerja serta peran Indonesia dalam menangani masalah-masalah internasional dapat dilihat dari kinerja serta perannya di masa lalu ketika menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode-periode sebelumnya. Tiga kali terpilihnya Indonesia juga menjadi bukti bahwa Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara-negara untuk dapat menyelesaikan permasalahan dunia dan menciptakan perdamaian dunia.

C. Tantangan Indonesia dalam Pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB

Tidak hanya memiliki keuntungan, akan tetapi ada pula tantangan yang harus dihadapi Indonesia, yaitu tantangan yang datang dari pesaingnya, Maladewa. Maladewa juga

mencalonkan diri untuk satu kursi DK PBB periode 2019-2020 dari grup kawasan Asia Pasifik. Maladewa bukanlah lawan yang mudah bagi Indonesia. Maladewa memiliki kekuatan sendiri untuk dapat terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

Pencalonan Maladewa sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 merupakan pencalonan yang pertama bagi Maladewa (Permanent Mission of The Republic of Maldives to The United Nations, 2016). Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan Maladewa untuk dapat terpilih, Maladewa bahkan dalam situs resminya menyatakan bahwa setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk melayani dalam badan PBB manapun (Ministry of Foreign Affairs Republic of Maldives, 2017). Maladewa mencoba menarik perhatian negara-negara dengan membahas topik kesempatan yang sama dalam PBB, yang mana dalam hal ini Maladewa belum pernah sama sekali menjadi anggota tidak tetap DK PBB sedangkan lawannya, Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Bahkan, Indonesia menganggap bahwa pencalonan pertama Maladewa tersebut merupakan tantangan bagi Indonesia. Menurut Arrmanantha Nassir selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Maladewa merupakan saingan yang berat bagi Indonesia, karena negara yang baru pertama kali mencalonkan diri pada pemilihan DK PBB dianggap dapat memberikan semangat baru dalam DK PBB, yang mana hal tersebut menjadi daya tarik negara-negara yang baru mencanlokkan diri, seperti Maladewa untuk dipilih dalam pemilihan DK PBB (Maulana, 2016). Maladewa pun yakin bahwa Maladewa akan membawa perspektif baru dan unik ke dalam DK PBB (Ministry of Foreign Affairs Republic of Maldives, 2017).

Tantangan lainnya menurut Indonesia adalah eksistensi Maladewa dalam ranah internasional, khususnya

PBB. Direktur Multilateral Kemenlu, Hasan Kleib juga mengatakan bahwa Maladewa tak boleh dianggap remeh karena Maladewa juga negara yang aktif di dunia internasional (Michaela, 2016). Maladewa menjadi ketua *Alliance for Small Island States* (AOSIS), anggota *United Nations Human Rights Council*, dan *Executive Board* dari *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women).

Pada tahun 2015, Maladewa menjadi ketua *Alliance for Small Island States* (AOSIS). Maladewa memimpin Aliansi Negara kepulauan kecil berkebang tersebut untuk menjadi blok negosiasi utama yang berhasil melahirkan dokumen-dokumen, antara lain: Kerangka Kerjasama Sendai untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, Perjanjian Addis Ababa mengenai pembiayaan untuk pembangunan, Agenda 2030 tentang pembangunan berkelanjutan, dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim (Permanent Mission of The Republic of Maldives to The United Nations, 2013). Maladewa dua kali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yaitu pada periode 2011-2013 dengan perolehan suara 185 (United Nations General Assembly, 2010) dan pada periode 2014-2016 (General Assembly of The United Nations, 2013). Maladewa menjadi anggota Dewan Eksekutif Wanita PBB pada periode 2013-2015 (UN-Women, 2013).